

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good governance adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapa pun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang dapat disebut lebih atau semakin baik jika tidak ada bukti bahwa pelayanan publik semakin baik dan semakin berkualitas.

Belakangan ini, penerapan prinsip *good governance* tidak lagi dipandang sebagai keharusan karena ada desakan tetapi sudah ditempatkan sebagai suatu kebutuhan organisasi untuk mempertahankan keberadaannya (eksistensi). Tanpa penerapan prinsip-prinsip *good governance* setiap organisasi dipastikan akan terancam keberadaan dan keberlanjutannya.

Di organisasi publik (organisasi pemerintah dan satuan-satuannya) peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini beralasan oleh karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor publik sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Begitu banyak pengaduan (keluhan) atau pernyataan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis di mana

kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. (Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009:7)

Proses perubahan yang terjadi dewasa ini di Indonesia, tanpa disadari memiliki kesearahan dengan kecenderungan perkembangan paradigma pembangunan dan pemerintahan dalam skala global. Berbagai Negara di hampir seluruh pelosok dunia, maupun lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam pemberian bantuan dan asistensi pembangunan, secara sinergis dalam dasawarsa terakhir ini sedang bergiat melakukan dan mempromosikan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsep pemerintahan yang baik. Trend global perubahan paradigma tersebut dalam banyak hal didorong oleh semangat belajar dari pengalaman berbagai kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang dalam beberapa decade yang lalu telah cenderung berdampak negatif bagi masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan hidupnya. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun di satu sisi sebagian masyarakat bahkan cenderung mengalami kemiskinan dan ketertinggalan yang semakin memburuk. (Lembaga Administrasi Negara, 2008:1-2).

Akuntabilitas publik dengan demikian menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Tujuannya menurut Islamy (1998:15) untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dengan adanya penjelasan secara transparan dan terbuka, masyarakat (publik) menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa

besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakan. Namun dalam kenyataannya, birokrasi publik kendatipun mampu memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan publik dengan standar kinerja tertentu, seringkali pada birokrasi publik terdapat ruang diskresi yang luas. Akibatnya, seringkali kewenangan birokrasi publik kurang memberikan kepuasan dalam penyediaan kebutuhan dan layanan lokal. Kewenangan birokrasi lokal dalam kenyataannya sering berdampak pada sulitnya melakukan kompromi antara tuntutan rakyat pemilih dengan kontrol pemerintah pusat., seperti apa yang dikemukakan oleh Smith (1985:29) : "*Local authority satisfies purely local needs in the provision of many services. In fact local authority effect a difficult compromise between the demands of their electorates and the controls of their central government*".

Disamping itu, birokrasi publik kurang atau tidak memiliki tanggungjawab yang tinggi baik dalam arti tanggungjawab, akuntabilitas, dan responsivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk mal-administrasi pada umumnya lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu jabatan hirarkhi, terutama pada tingkat bawah ("*... more commonly associated with the behavior of individuals occupying positions within the hierarchy - usually at the bottom*"). Penyebab utama timbulnya mal-administrasi., menurut Islamy (1998:1a) adalah rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengekangan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang-suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik di kalangan penguasa dan belum adanya *code of conduct* yang kuat yang diberlakukan bagi

aparatus di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil. Masalah akuntabilitas menjadi lebih "akut" pada lembaga publik bukan semata-mata karena sifat individu pelaku dan kurangnya tanggungjawab pribadi, tetapi disebabkan karena sifat pekerjaan dan pertanggungjawaban merupakan kepentingan pribadi pemerintah sendiri. Individu birokrat sering kali bersikap overacting dan melampaui wilayah kewenangannya. (Widodo, 2001:4-7)

Good Governance diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan Publik yang buruk di mata masyarakat. Beberapa masalah pelayanan Publik adalah seperti maraknya tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, birokrasi yang lamban dan berbelit-belit, pegawai pemerintah yang tidak ramah, tertutupnya informasi kepada masyarakat, pemborosan anggaran pada hal-hal yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, kritikan maupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan yang sering melihat suku, agama, jabatan, status sosial masyarakat serta hubungan kekeluargaan. Masalah-masalah di atas telah menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah (Sianipar, 2001: 6-7).

Tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban pelayanan publiknya yang memenuhi prinsip-prinsip: **Partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi.** Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya perubahan *mindset dan culture-set*

pemerintah melalui upaya pengembangan lembaga yang mencerminkan nilai-nilai *good governance*. (Wibawa, 2009:73).

Sesuai dengan uraian diatas hal ini belum maksimal diterapkan di Daerah seperti hal yang ditunjukkan oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* di dukung dengan :

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kurang terbuka dalam pelaksanaan pelayanan yang mengakibatkan pelayanan terkesan lambat;
2. Kurangnya transparansi Informasi tentang penggunaan Anggaran kepada staf dan masyarakat;
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis dapat menarik garis merah bahwa *Good Governance* akan tercapai apabila Implementasi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipatif, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (Santosa, 2008:xi).

Beranjak dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penulisan tentang Implementasi *Good Governance* dalam pelayanan Publik dan menyusunnya dalam karya ilmiah dengan judul :”**Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *Good governance* di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ini dilaksanakan dan menempatkan suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian studi perbandingan antara pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama prinsip-prinsip *Good Governance* dengan kenyataan yang ada di lapangan dan guna mendapatkan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

2. Manfaat Praktis

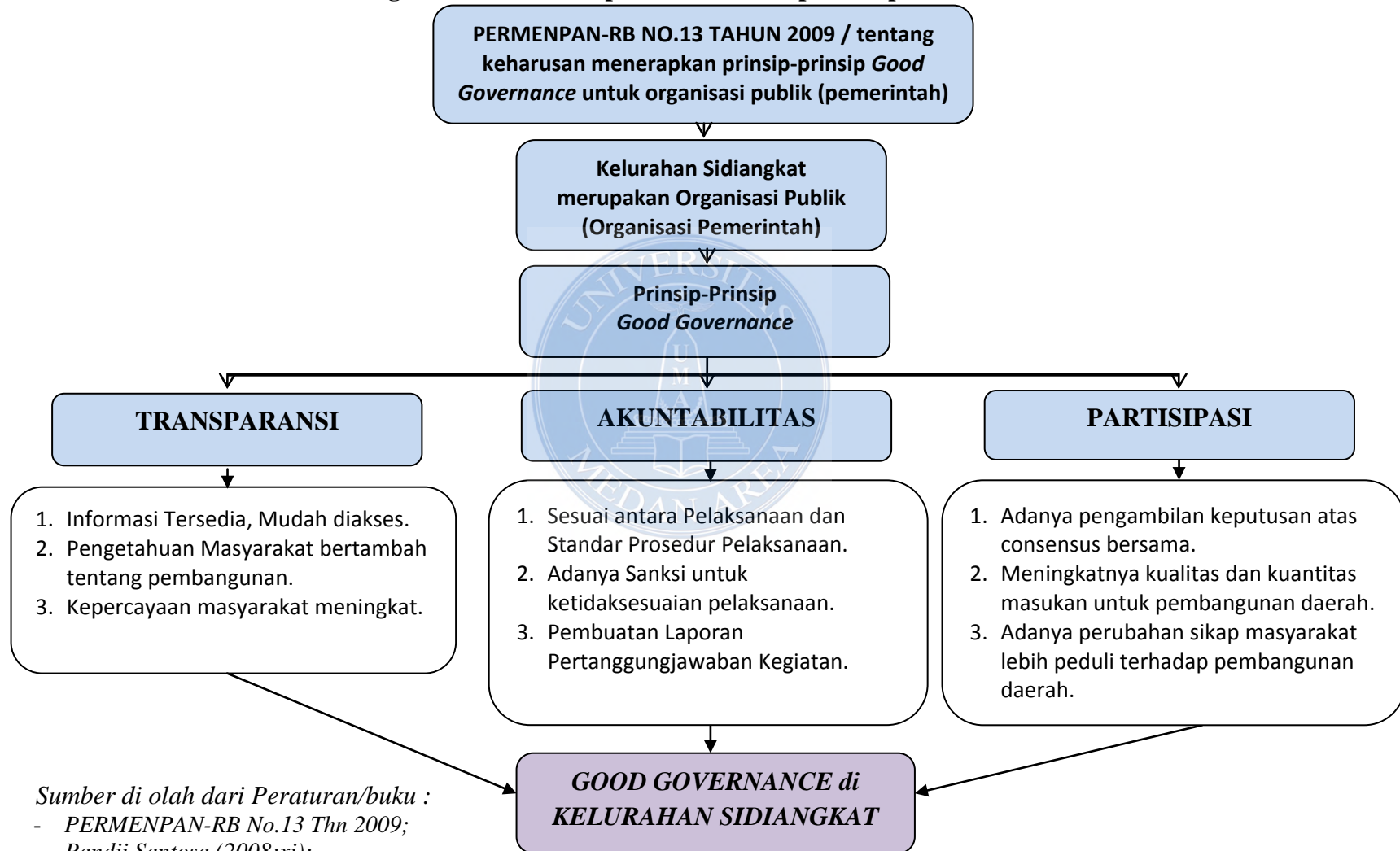
Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi aparat Kantor Kelurahan Sidiangkat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Sidiangkat.



1.5. Kerangka Pemikiran.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance*



Sumber di olah dari Peraturan/buku :
- PERMENPAN-RB No.13 Thn 2009;
- Pandji Santosa (2008:xi);
- Sedarmayanti (2007:16-23).

Bahwasanya faktor **Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi** ini sangat menentukan terwujudnya *Good Governance* hal ini didukung oleh pendapat Pandji Santosa (2008:xi).

